

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan telah menjadi bagian umum dari kehidupan di negara-negara berkembang. Tidak terkecuali Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki banyak potensi sumber daya alam untuk menyelamatkan negara dan masyarakatnya dari kemiskinan. Masih banyak lagi masyarakat Indonesia yang tidak bisa keluar dari kemiskinan dan mengatasi kemiskinan. Hal ini memperumit kemiskinan Indonesia setiap tahunnya.

Kemiskinan merupakan masalah serius yang masih ditangani di banyak negara di dunia. Hingga pemerintah telah menetapkan kebijakan atau program untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu program tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan tunai langsung dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (tunai) yang diberikan kepada masyarakat miskin setelah pemerintah menaikkan harga BBM dengan cara mengurangi subsidi BBM dengan berbagai sisa subsidi didistribusikan kepada masyarakat miskin (Selviana, 2016).

Masalah kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks, negara tidak dapat menyelesaikan masalah itu sendiri. Kemiskinan sering dilihat sebagai suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu melaksanakan hak-hak dasarnya untuk memelihara dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat atau tidak mampu bekerja untuk mendapatkan uang yang cukup

untuk kepuasan hidup mereka. Kemiskinan adalah seseorang yang tinggal di suatu negara tanpa memiliki kekayaan, pendapatan rendah dan ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) termasuk dalam kategori bantuan keuangan tanpa syarat yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2008 dan ditujukan hanya untuk masyarakat miskin, sehingga mereka tidak dapat merasakan dampak dari kenaikan harga bahan bakar. Hal ini didasarkan pada kebijakan pemerintah yang lebih banyak membantu masyarakat miskin dibandingkan kelompok lainnya, yang jelas berpengaruh terhadap persepsi kenaikan harga BBM. Selain itu, BLT juga berfungsi sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM kepada RTS. Subsidi BBM yang dihilangkan pemerintah pada tahun 2008 dinilai memenuhi APBN dan menyebabkan defisit perbendaharaan negara naik. Oleh karena itu, BLT diluncurkan sebagai kompensasi bagi masyarakat miskin.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 berlangsung selama 12 bulan yang dimana telah disalurkan selama 12 bulan 4 gelombang atau 3 bulan sekali pelaksanaan kegiatan pembagiann uang tunai tersebut. Syarat mengambil uang BLT tersebut hanya perlu membawa KK (Kartu Keluarga) atau KTP (Kartu Tanda Penduduk). Jumlah penerima bantuan tersebut di gelombang pertama yaitu 191 orang, dengan masing-masing mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) per bulan juga per orang. Dan pembagian uang tersebut dilaksanakan 3 bulan sekali dengan 4 tahap atau gelombang. 1 kali menerima yaitu penerima mendapatkan Rp.900.000

(sembilan ratus ribu) per orang dalam jangka 3 bulan. Total uang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada saat pandemi Covid-19 2020 adalah Rp. 522.250.000,00. Dan pada tahun 2021 total uang yang disalurkan hanya Rp.411.000.000,00.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah kita untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan di Indonesia. Tingkat kesejahteraan di 3able3 kita dianggap masih sangat kurang dikarenakan masih begitu banyak masyarakat yang memiliki kehidupan yang kurang layak yang diakibat oleh beberapa 3able3 seperti pengangguran, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Masalah Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Penanganan Kemiskinan di Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang mana penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang hal-hal yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah untuk mendapatkan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, kepala urusan pemerintahan desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan sosial di Indonesia, perlindungan sosial melalui pemberian BLT di masa pandemi covid-19 serta dampak yang ditimbulkan dari segi ekonomi dan sosial. Metode yang

digunakan adalah metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui *library studies* (studi kepustakaan), di mana penulis melakukan penelusuran terhadap literatur kemudian melakukan penelaahan. Setelah itu, dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah bahwa: *Pertama*, di Indonesia, pelaksanaan sistem perlindungan sosial telah dilakukan melalui berbagai program dan telah berjalan lama. Program-program perlindungan sosial tersebut telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan orde baru. *Kedua*, pada masa pandemic covid-19 pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk tunai yang ditujukan kepada kelompok masyarakat paling terdampak pandemi COVID-19, meliputi masyarakat miskin, pekerja informal serta pelaku usaha transportasi daring. *Ketiga*, secara ekonomi, pemberian BLT di satu sisi memberikan dampak yang sangat signifikan untuk mempertahankan daya beli dan kepada kelompok pelaku usaha untuk kelangsungan usaha dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK), namun dari segi sosial dapat memicu gejolak berupa konflik serta timbulnya korupsi.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana pelaksanaan program BLT di Desa Sungai Dungun, bagaimana efektivitas pelaksanaan program BLT di Desa Sungai Dungun, adakah kendala dalam pelaksanaan program BLT di Desa Sungai Dungun dan bagaimana solusinya. Sedangkan tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain: Untuk mencari tahu seperti apa pelaksanaan program BLT di Desa Sungai Dungun, Apakah pelaksanaan program BLT di Desa Sungai Dungun sudah berjalan efektif, dan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan program BLT di Desa Sungai

Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan yaitu di antaranya, Kepala Desa Sungai Dungun, Perangkat Desa Sungai Dungun dan Masyarakat penerima BLT.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa Pelaksanaan Program BLT di Desa Sungai Dungun sudah berjalan dengan baik, dimana waktu pelaksanaan sudah berjalan tepat waktu, dan kehadiran pengawas dalam pelaksanaan program BLT yang baik. Namun program BLT di Desa Sungai Dungun belum berjalan efektif dimana penerima BLT yang belum tepat sasaran karena masih ditemukan adanya masyarakat yang dinilai sudah mampu secara ekonomi namun mendapatkan BLT. Kendala yang dihadapi dalam program BLT di Desa Sungai Dungun adalah adanya pengaduan dari masyarakat yang menilai bahwa penerima BLT ini belum tepat sasaran. Saran penelitian ini adalah dalam penetapan calon penerima BLT harus lebih teliti lagi agar penerima BLT dapat diberikan sesuai dengan kriteria calon penerima BLT. Perlu adanya kerjasama yang baik antara tim pelaksana program BLT dengan RT / RW dalam proses penetapan calon penerima BLT. Perlu adanya pendataan yang kasat mata agar calon penerima BLT merupakan masyarakat yang berhak menerima.

Kriteria Calon Penerima Program BLT-Dana Desa Dalam Kesejahteraan ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melimpahkan dana sebesar Rp 22,4 triliun untuk 12.487.646 kartu keluarga miskin yang sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (31

persen dari total Dana Desa tahun 2020 yakni Rp 72 triliun). Penerima BLT diprioritaskan untuk keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dan mereka yang belum mendapatkan manfaat kartu prakerja dan juga keluarga miskin yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maupun tidak terdata akan mendapatkan bantuan tersebut jika memenuhi kriteria (Prabandari, 2020:

Kriteria calon penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut ini:

1. Tidak mendapat PKH atau BPNT dan Kartu Prakerja
2. Masyarakat yang tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama masa pandemi (tiga bulan kedepan) dikarenakan kehilangan mata pencaharian akibat pandemi covid-19
3. Masyarakat yang rentan sakit atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun atau kronis.

Seperti yang telah dijelaskan, penerima BLT-Dana Desa diprioritaskan bagi keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Keluarga miskin ditetapkan atas putusan bersama dalam musyawarah desa dalam musyawarah tersebut pula akan dibahas mengenai pemilihan target sasaran agar tidak terjadi salah sasaran program bantuan BLT-Dana Desa ini. Keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa ditetapkan melalui pelaksanaan pendekatan yang memperkuat moral sosial melalui gotong royong dan musyawarah. Semakin banyaknya kriteria keluarga miskin yang dipenuhi maka semakin prioritas pula mereka menjadi penerima BLT-Dana Desa (BAPPENAS, 2020: 8).

Ketiga kriteria yang telah dijelaskan diatas adalah kriteria yang bersumber dari Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 tahun 2020. Sementara itu terdapat sumber kriteria lain untuk calon penerima BLT-Dana Desa yaitu berdasarkan Surat Menteri Desa PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 Perihal Pemberitahuan yang berisi tentang pedoman pendataan calon penerima BLT-Dana Desa yang memuat 14 kriteria. Kriteria tersebut mirip dengan kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM) dari kementerian sosial yang pada umumnya dapat menyulitkan para aktor desa dalam menemukan keluarga calon penerima BLT-Dana Desa yang memenuhi ke 14 kriteria tersebut. Kriteria penduduk miskin calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan Surat Menteri Desa PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai kurang dari 8 m² per orang
2. Lantai tanah/bambu/kayu murah
3. Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4. Buang air besar tanpa fasilitas (bersama orang lain)
5. Penerangan tanpa listrik
6. Air minum dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi (sungai/air hujan)
7. Bahan bakar dari kayu bakar atau arang atau minyak tanah
8. Konsumsi daging/ayam/susu hanya satu kali per minggu
9. Satu stel pakaian pertahun
10. Makan satu sampai dua kali perhari
11. Tidak sanggup berobat ke puskesmas atau poliklinik

12. Sumber penghasilan KK (Kartu Keluarga) petani berlahan kurang dari 500 m² , buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan dan pekerjaan lain berupah kurang dari Rp. 600.000 (enam ratus ribu) perbulan
13. Pendidikan KK (Kartu Keluarga) tidak sekolah atau tidak tamat SD atau hanya sampai tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang bisa dijual minimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu)

Dari 14 kriteria diatas minimal sembilan harus dipenuhi jika ingin mendapat BLT-Dana Desa, namun pada umumnya informan berkeberatan dengan 14 kriteria tersebut sebab menemukan keluarga yang memenuhi Sembilan dari kriteria calon penerima bansos (bantuan sosial) saja sangat sulit apalagi 14 kriteria (Kurniawan, 2020: 7).

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masaalah yang timbul dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Masyarakat miskin lainnya masih ada yang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena dari kriteria yang ada masih ada yang tidak tepat sasaran.
2. Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sungai Dungun sehingga masih ada masyarakat misikin yang belum mendapatkan BLT.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diperlukan untuk membatasi pembatasan masalah agar terarah dan jelas dalam penelitian ini maka peneliti membatasi masalah yang akan difokuskan untuk diteliti tentang “Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Keluarga Miskin Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah”.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis akan kemukakan rumusan masalah yaitu “Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Keluarga Miskin Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah”.

Karena itu perlu dianalisis pula mengenai keberhasilan dari BLT tersebut sebagai salah satu program pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji melalui suatu penelitian dengan melihat persoalan pada :

1. Bagaimana pelaksanaan program BLT dalam masalah pembagian yang benar ?
2. Bagaimana pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sungai Dungun sehingga masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan BLT dikarenakan masih tidak tepat sasaran ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kekeliruan dalam proses pendataan yang terjadi pada program BLT untuk mendapatkan pendataan yang lebih akurat.

Namun secara spesifik tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) dengan benar.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Sungai Dungun agar berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan juga tepat jumlah.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian dimulai ketika ingin mengetahui sesuatu, penelitian dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam membuat keputusan. Secara Spesifik manfaat penelitian di bidang apapun di bagi menjadi dua aspek, yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan Desa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan dalam penerapan media pembelajaran.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah pengetahuan serta pemahaman masyarakat terkait tentang kesejahteraan sosial masyarakat.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi buruh bangunan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi sumber bacaan serta informasi upaya dalam meningkatkan kesejahteraan.

2. Bagi masyarakat hasil ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di desa Sungai Dungun Kecamatan sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

3. Bagi Universitas Tanjungpura, penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan serta menjadi sumber informasi yang baik kepada para mahasiswa.